

Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Upaya Pemungutan Pajak (*Tax Effort*) Provinsi di Indonesia

Yohanes Adi Nugroho¹, Desty Wana²

¹ Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak
Email : Yohanesadi.nu@gmail

² Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak
Email : destywana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal (BM) terhadap Tax Effort (TE) Provinsi di Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak tersebut adalah terbatasnya ruang bagi pemerintah untuk melakukan tax effort atau upaya lebih dalam mengejar penerimaan pajak. Selain itu, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal (shadow economy) sehingga pemerintah kesulitan dalam melakukan tax effort. Metode Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan bantuan software WarpPls 7.0. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi di Indonesia periode 2017-2020. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap Tax Effort (TE). Dengan demikian, sudah seharusnya Pemerintah mengoptimalkan Upaya Pemungutan Pajak dengan Tax Effort karena hal tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara maupun daerah di Indonesia.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Tax Effort

Abstract

This study aims to examine the effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and Capital Expenditure (BM) on the Provincial Tax Effort (TE) in Indonesia. One of the causes of the low tax revenue is the limited space for the government to make tax efforts or more efforts in pursuing tax revenues. In addition, economic activities that are not formally recorded (shadow economy) make it difficult for the government to make tax efforts. This research method uses multiple regression analysis with purposive sampling technique with the help of WarpPls 7.0 software. This research was conducted in provinces in Indonesia for the period 2017-2020. The results of this study found that the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and Capital Expenditure (BM) had a significant effect on Tax Effort (TE). Thus, the Government should optimize Tax Collection Efforts with Tax Effort because this is one of the efforts to increase state and regional revenues in Indonesia.

Keywords: General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), Tax Effort

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Konsekuensi pengimplementasian otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal yang ditandai dengan timbulnya suatu proses distribusi anggaran kepada daerah sebagai konsekuensi atas penyerahan ataupun pelimpahan wewenang pemerintahan, sesuai dengan prinsip *money follows function*.

Indonesia saat ini mengadopsi desentralisasi fiskal dilihat berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran. Nikijuluw (2012) mengungkapkan bahwa meskipun desain desentralisasi fiskal banyak mencakup mekanisme Dana Perimbangan, local taxing power harus tetap dijaga. Hal ini tercermin dari misi pengimplementasian desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu sebagai penguatan pajak daerah tanpa harus merusak prinsip efisiensi secara nasional.

Penerimaan pajak daerah merupakan faktor utama yang harus ditingkatkan karena digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan. Jika dilihat pada tahun 2019 bahwa pemerintah gagal mencapai target tax ratio yang hanya terealisasi sebesar 10,73% dari 12,2% dari yang ditargetkan. Selain itu, angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 11,4%. Penurunan angka tax ratio ini tidak terlepas dari rendahnya penerimaan pajak tahun 2019 yang mengalami shortfall hingga Rp245,4 miliar dan hanya tumbuh sebesar 1,43% sejak tahun 2010.

Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak tersebut adalah terbatasnya ruang bagi pemerintah untuk melakukan tax effort atau upaya lebih dalam mengejar penerimaan pajak. Selain itu, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal (shadow

economy) sehingga pemerintah kesulitan dalam melakukan tax effort.

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat bertahan jika masyarakat dimana perusahaan tersebut berada merasa bahwa perusahaan telah beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan terkait upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2011).

Ariani (2010:24) menyatakan bahwa upaya pajak (tax effort) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Upaya pajak yang berhasil dapat memungkinkan peningkatan PAD, PAD yang kuat dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja daerah yang diantaranya belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor.

Sedangkan Irianto (2013:25) menyatakan bahwa tax effort (upaya pajak) merupakan angka banding antara penerimaan pajak actual dengan kemampuan penduduk membayar pajak (tax capacity). Kapasitas membayar pajak sering disebut dasar pengenaan pajak (tax base). Dalam praktik perhitungan kesulitan menghitung kapasitas pajak diatasi dengan PDB sebagai proxinya. Karena dihubungkan dengan PDB, selain dengan tax effort, kinerja perpajakan juga dapat diukur dengan angka banding antara persentase kenaikan penerimaan pajak dengan persentase kenaikan PDB.

2. KAJIAN LITERATUR

Dana Alokasi Umum dan Tax Effort

Pemerintah daerah selain menerima dana bagi hasil juga menerima dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang menjadi inisiatif pemerintah pusat dalam mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana alokasi umum diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan daerahnya sendiri sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Dana alokasi umum bukan menjadi alasan pemerintah daerah untuk lengah dalam meningkatkan tax effort, pernyataan tersebut sesuai dengan temuan Nikijuluw (2012) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap tax effort. Hipotesis dalam penelitian ini, adalah:

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tax Effort.

Dana Alokasi Khusus dan Tax Effort

Dana alokasi khusus diterima pemerintah daerah untuk membiaya kegiatan- kegiatan tertentu seperti pembangunan dan lainnya. Dana alokasi khusus dapat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan. Semakin meningkatnya perekonomian dan pembangunan di daerah akan meningkatkan pula tax effort di daerah tersebut. Tax effort menjadi gambaran atas kesuksesan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nikijuluw (2012) dengan objek penelitian kabupaten / kota di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap upaya pemungutan pajak. Kesimpulan tersebut kurang sesuai dengan sebagaimana kegunaan pemberian dana alokasi khusus. Hipotesis dalam penelitian ini, adalah:

H₂ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tax Effort.

Dana Bagi Hasil dan Tax Effort

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah

provinsi. Dana bagi hasil merupakan hasil dari prosentase atas potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut dan/atau hasil potensi dari daerah lain. Dana bagi hasil seharusnya mampu menjadi motivator dalam meningkatkan tax effort, sehingga ketika tax effort bertambah maka akan menunjukkan peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Nikijuluw (2012) menemukan adanya pengaruh dana bagi hasil yang signifikan terhadap tax effort. Hipotesis dalam penelitian, adalah:

H₃ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tax Effort.

Belanja Modal dan Tax Effort

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Peningkatan kualitas dan efektivitas upaya pengumpulan pajak dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan alokasi belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Hipotesis dalam penelitian, adalah:

H₄ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Tax Effort.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Didalam penelitian ini teknik Purposive Sampling yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian dimana responden yang akan dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi ialah:

- a. Provinsi yang menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut dari 2017-

2020.

- b. Provinsi yang memiliki data PDRB berturut-turut dari tahun 2017-2020.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent) yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tax Effort. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk membayar pajak adalah produk domestik regional bruto.

Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif dan sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen, yaitu:

- a. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- b. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- c. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- d. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap ini mengevaluasi validitas dan reliabilitas setiap konstruk atau variabel laten. Uji Model Pengukuran dilakukan meliputi:

Convergent Validity

Convergent validity dapat dilihat dari nilai *factor loading*. Jika *factor loading* >0,50, maka dapat dikatakan memenuhi kriteria *convergent validity*. Akan tetapi jika *factor loading* <0,50, maka dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria *convergent validity*. Nilai *factor loading* dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. *Combine Loading* dan *Cross Loadings*

Variabel	Faktor Loading	P value	Indikator
DAU	1.000	<0.001	valid
DAK	1.000	<0.001	valid
DBH	1.000	<0.001	Valid
BM	1.000	<0.001	valid
TE	1.000	<0.001	valid

Discriminant Validity

Metode untuk melihat validitas diskriminan keseluruhan indikator secara bersama-sama dapat dilihat dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap variabel laten dengan korelasi antar variabel laten bersangkutan dengan variabel laten lainnya. Bilamana akar AVE (pada diagonal utama) lebih besar dari korelasi variabel yang bersangkutan, maka terpenuhi validitas diskriminan (Solimun dan Fernandes, 2017).

Tabel 2. Akar AVE dan Koefisien Korelasi

	DAU	DAK	DBH	BM	TE
DAU	1.000	0.500	-0.300	-0.190	0.426
DAK	0.500	1.000	0.156	0.268	-0.138
DBH	-0.300	0.156	1.000	0.913	-0.034
BM	-0.190	0.268	0.913	1.000	-0.013
TE	0.426	-0.138	-0.034	-0.013	1.000

Composite Reliability

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu cronbach's alpha dan composite reliability. Menggunakan metode cronbach's alpha, suatu konstruk

dikatakan reliabel apabila nilainya $>0,6$. Apabila menggunakan composite reliability, suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilainya $> 0,7$ meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hartono dan Abdillah, 2014:61-62).

Tabel 3. *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	Composite Reliability Coefficient	Cronbach's alpha coefficient
DAU	1.000	1.000
DAK	1.000	1.000
DBH	1.000	1.000
BM	1.000	1.000
TE	1.000	1.000

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R squared untuk konstruk endogen, Q squared untuk penilaian validitas prediktif, dan nilai koefisien path atau p-values setiap path untuk uji

signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Hartono dan Abdillah (2014:63) menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai R squared berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Selanjutnya, nilai Q squared yang lebih besar dari nol menunjukkan validitas prediktif yang baik (Sholihin dan Ratmono, 2013:73).

Koefisien Variabel Laten

Tabel 4. Koefisien Variabel Laten

	DAU	DAK	DBH	BM	TE
R-squared					0.438
Adjusted R-squared					0.423
Full collinearity VIFs	2.792	2.281	6.744	6.722	1.729
Q-squared coefficients					0.516

Berdasarkan tabel 4. diperoleh nilai R-squared untuk variabel *Tax Effort* sebesar 0.438 yang memiliki arti bahwa kontribusi pengaruh variable Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal yaitu sebesar 43,8 % dan sisanya 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Model Fit dan Quality Indices

Untuk menilai model tersebut fit dalam aplikasi WrapPLS 7.0 kita dapat melihatnya dari output general results. Pada pengolahan data pertama dengan WrapPLS 7 dengan model moderating link options memperoleh hasil model fit dan quality indices sebagai :

Tabel 5. Model Fit dan Quality Indices

Model Fit dan Quality Indices	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
Average path coefficient (APC)	$p < 0.05$	0.372, $P < 0.001$	Baik
Average R-squared (ARS)	$p < 0.05$	0.438, $P < 0.001$	Baik
Average adjusted R-squared (AARS)	$p < 0.05$	0.423, $P < 0.001$	Baik
Average block VIF (AVIF)	Diterima jika ≤ 5 , ideal ≤ 3.3	1.392	Ideal
Average full collinearity VIF (AFVIF)	Diterima jika ≤ 5 , ideal ≤ 3.3	4.054	Ideal
Tenenhaus GoF (GoF)=0.773, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	Kecil ≥ 0.1 , Menengah ≥ 0.25 , Besar ≥ 0.36	0.662	Besar
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.875, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1	Diterima jika ≥ 0.7 , ideal = 1	0.750	Ideal

R-squared contribution ratio (RSCR)=0.993, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1	Diterima jika ≥ 0.9 , ideal = 1	0.888	Kurang Ideal
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7	Diterima jika ≥ 0.7 , ideal = 1	0.250	Kurang Ideal
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7	Diterima jika ≥ 0.7 , ideal = 1	0.500	Kurang Ideal

Berdasarkan tabel 5. diperoleh nilai APC sebesar 0.372, $P < 0.001$, sehingga dapat disimpulkan model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi yaitu baik. (Solimun dan Fernandes, 2017). Nilai ARS sebesar 0.438, $P < 0.001$, hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi (Solimun dan Fernandes, 2017). Batas nilai yang dapat diterima untuk nilai AARS, ditentukan oleh p-value yang dihasilkan yaitu ≤ 0.05 nilai AARS 0.423, $P < 0.001$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat signifikansi (Solimun dan Fernandes, 2017).

Batas nilai ideal AVIF adalah ≤ 3.3 dan masih bisa diterima/ditoleransi sampai pada nilai 5. Berdasarkan tabel 7. diperoleh nilai AVIF sebesar 1.392 artinya masuk pada kategori nilai yang ideal, maka dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (Solimun dan Fernandes, 2017). Batas nilai ideal AFVIF adalah ≤ 3.3 dan masih bisa diterima/ditoleransi sampai pada nilai 5, nilai AFVIF sebesar 4.054, artinya masuk pada kategori nilai yang ideal, hal ini dapat disimpulkan model yang dibangun dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (Solimun dan Fernandes, 2017). Batas nilai GoF mempunyai tiga kategori yaitu kecil ≥ 0.1 , menengah ≥ 0.25 , dan besar ≥ 0.36 . Berdasarkan tabel 5. diperoleh nilai GoF = 0.662, artinya masuk pada kategori nilai yang besar, jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan model dalam

penelitian ini melakukan prediksi yang besar (Solimun dan Fernandes, 2017).

Batas nilai ideal SPR adalah 1 dan masih bisa diterima/ditoleransi apabila ≥ 0.7 . Berdasarkan tabel 5. diperoleh nilai SPR sebesar 0.750 artinya masuk pada kategori nilai yang ideal, jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel (Solimun dan Fernandes, 2017). Batas nilai ideal RSCR adalah 1 dan masih bisa diterima/ditoleransi apabila ≥ 0.9 . Berdasarkan tabel 5. diperoleh nilai RSCR = 0.888, artinya masuk pada kategori nilai yang kurang ideal, jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mampu menunjukkan kemampuan variabel prediktor dalam menjelaskan variabel respon (Solimun dan Fernandes, 2017). Batas nilai ideal SSR adalah 1 dan masih bisa diterima/ditoleransi apabila ≥ 0.7 . Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai SSR = 0.250, artinya masuk pada kategori nilai kurang ideal, jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini kurang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel (Solimun dan Fernandes, 2017). Batas nilai ideal NLBCDR adalah 1 dan masih bisa diterima/ditoleransi apabila ≥ 0.7 . Berdasarkan tabel 5. diperoleh nilai NLBCDR = 0.500, artinya masuk pada kategori nilai kurang ideal, jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini kurang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel (Solimun dan Fernandes, 2017). Dari seluruh hasil output model fit dan quality indices pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa model penelitian mempunyai

fit yang baik karena semua nilai kriteria dapat diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk diukur

dengan melihat path coefficients dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang terdapat di bab dua. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0.05.

Tabel 6. Path Coefficients dan P-Values

	Koefisien	P Value	Keterangan	Hipotesis
DAU→TE	0.667	<0.001	Berpengaruh Signifikan	H1 diterima
DAK→TE	-0.312	<0.001	Berpengaruh Signifikan	H2 diterima
DBH→TE	-0.224	0.002	Berpengaruh Signifikan	H3 diterima
BM→TE	0.286	<0.001	Berpengaruh Signifikan	H4 diterima

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa nilai koefisien DAU berpengaruh positif dengan p value terhadap Tax Effort. Dari hasil penelitian diperoleh p value <0.001 sedangkan koefisien 0.667, hal ini menunjukkan bahwa DAU Berpengaruh terhadap TE, dengan demikian H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikijuluw (2012) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap tax effort. Hal itu disebabkan Dana alokasi umum merupakan dana yang menjadi inisiatif pemerintah pusat dalam mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana alokasi umum diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan daerahnya sendiri sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu, dengan adanya penyaluran DAU dapat mempengaruhi Tax Effort.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa nilai koefisien DAK berpengaruh negatif dengan p value terhadap Tax Effort. Dari hasil penelitian diperoleh p value <0.001 sedangkan koefisien -0.312, hal ini

menunjukkan bahwa DAK Berpengaruh terhadap TE, dengan demikian H2 diterima. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikijuluw (2012) dengan objek penelitian kabupaten / kota di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap upaya pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Hipotesis Ketiga yang diajukan menyatakan bahwa nilai koefisien DBH berpengaruh negatif dengan p value terhadap Tax Effort. Dari hasil penelitian diperoleh p value 0.002 sedangkan koefisien -0.224, hal ini menunjukkan bahwa DBH Berpengaruh terhadap TE, dengan demikian H3 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikijuluw (2012) menemukan adanya pengaruh dana bagi hasil yang signifikan terhadap tax effort.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Hipotesis Keempat yang diajukan menyatakan bahwa nilai koefisien BM berpengaruh positif dengan p value terhadap Tax Effort. Dari hasil penelitian diperoleh p value <0.001 sedangkan koefisien 0.286, hal ini

menunjukkan bahwa BM Berpengaruh terhadap TE, dengan demikian H4 diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap Tax Effort (TE). Dengan demikian, sudah seharusnya Pemerintah mengoptimalkan Upaya Pemungutan Pajak dengan Tax Effort karena hal tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara maupun daerah di Indonesia.

6. REFERENSI

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah-Edisi Revisi; Salemba Empat, Jakarta.
- Adi, 2008. Relevansi transfer pemerintah pusat dengan upaya pajak daerah pada pemerintah kota dan kabupaten se Jawa. Skripsi.
- Ahmad Yani. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia; Rajawali Pers, Jakarta.
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar. 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem

Dana; Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

- Edi Slamet Irianto. 2013. Pajak Kepemimpinan & Masa Depan Lintas Generasi; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Semarang.
- Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21; Penerbit UNDIP, Semarang.
- Kurnia Rina Ariani. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Priyo Hadi Adi. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa). The 2nd National converence UKWMS
- Ruth Nikijuluw. 2012. Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 12 No 2 Hal 168-191 ISSN 1411-5212.
- Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi; PT. Refika Aditama, Bandung